

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagai bentuk kewajiban dan tanggungjawab negara dalam upaya melindungi Hak Asasi Manusia termasuk didalamnya juga Hak Asasi Anak. Maka sudah dibentuk beberapa Peraturan Perundang-undangan yang didalamnya menjelaskan tentang jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Anak. Selain itu dalam pasal-pasal peraturan-peraturan yang terkait dalam upaya perlindungan anak tersebut sudah saling terkait, mendukung dan menguatkan. Adapun peraturan-peraturan yang terkait dalam upaya menjamin dan melindungi hak anak tersebut sebagai berikut :

- a. Undang –Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- c. Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- d. Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- e. PERMENKES Nomer 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS
- f. PERDA Nomer 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.

2. Dari ke-4 responden dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pemenuhan hak-hak anak sendiri sudah terpenuhi seperti hak atas kelangsungan hidup, hak atas perlindungan, hak atas perkembangan dan hak untuk berpartisipasi. Dimana ini terlihat dengan adanya Rumah Singgah yang didirikan khusus untuk ibu dan anak HIV/AIDS di Kota Semarang. Selain itu juga dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan juga cukup mudah dimana di kota semarang sendiri sudah banyak klinik vct dan IMS didirikan. Bukan hanya itu saja tetapi dalam memperoleh obat ARV pun sudah disubsidi secara gratis oleh pemerintah.
 3. Faktor pendukung dalam pemenuhan hak anak pengidap HIV/AIDS ini yaitu sudah adanya peraturan-peraturan yang mengatur mengenai hak-hak anak. Kemudian adanya upaya penyuluhan dan sosialisasi tentang HIV/AIDS dan anti diskriminasi terhadap Orang dengan HIV/AIDS termasuk didalamnya anak dengan HIV/AIDS. Yang terakhir yaitu adanya pemberian dana APBD yang melalui Dinas Kesehatan Kota semarang diberikan kepada Komisi Penanggulangan AIDS yang selanjutnya di alokasikan ke beberapa LSM dan Rumah Singgah.
- Faktor penghambat dalam pemenuhan hak anak pengidap HIV/AIDS ini yaitu Anggaran yang masih minim untuk program pencegahan HIV/AIDS yang belum mampu menjangkau seluruh wilayah di Kota Semarang secara merata dan masih rendahnya pengetahuan HIV dan

AIDS yang mengakibatkan Stigma dan diskriminasi masih cukup tinggi.

4. Saran

1. Untuk Pemerintah Kota Semarang terutama KPA dan DKK diharapkan kedepannya mampu membuat program jaminan hidup untuk anak-anak pengidap HIV/AIDS sehingga hak-hak anak tersebut jelas akan jaminan perlindungannya.
2. Untuk KPA dan DKK diharapkan mampu meningkatkan kegiatan Sosialisasi mengenai HIV/AIDS kepada warga kota semarang sehingga tingkat pengetahuan tentang HIV/AIDS warga kota semarang semakin baik sehingga stigma dan diskriminasi terhadap ODHA maupun ADHA dapat diminimalisir.
3. Peran atau partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak. Seperti peran WPA (Warga Peduli AIDS) perlu ditingkatkan karena dengan adanya peran aktif dari WPA diharapkan mampu mengurangi stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap ODHA maupun ADHA. karena masyarakat juga mempunyai peranan penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Pihak yang berkewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak tidak hanya orang tua dan keluarga namun negara dan masyarakat juga berkewajiban menjamin pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

4. Untuk pihak LSM dan Yayasan atau Rumah Singgah apabila mengalami kendala terhadap pendanaan maka dapat mengajukan proposal bantuan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dimana untuk mendapatkan dana hibah dan atau Bantuan tersebut pihak LSM maupun Rumah singgah terlebih dahulu harus berbadan hukum.